

SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

ARINI PUSPITA



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

sebagai salah satu syarat persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ARINI PUSPITA
A31107694**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Grace T. Pontoh dan Bapak M. Achyar Ibrahim sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak Faisal A. Sappada sebagai Sekertaris Daerah Kota Parepare atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di kota Parepare. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Bapak/Ibu SKPD dan SKPKD yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu beserta staf bendahara penerimaan dan pengeluaran yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, September 2012

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare

The User Analyze of The Local Financial Management Informastion System in Parepare City

Arini Puspita
Grace T. Pontoh
M. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat penerimaan pengguna Sistem Informaasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) kota Parepare. Model yang digunakan untuk menjelaskan penerimaan pengguna SIPKD adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan tiga kontruk utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan penerimaan pengguna. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan dan penerimaan pengguna, sementara persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pengguna

Kata kunci: *Technology Acceptance Model*, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, niat menggunakan intans.

This research aims to test the level of user acceptance of the local financial management information system in Parepare city. The model that used to explain user acceptance of SIPKD is Tecchnology Acceptance Model (TAM) with three main construct, namely perceived ease of use, perceived usefules, and user acceptance. The data used are primary data obtained using a questionnaire. Research findings show that perceived ease of use effected on perceived usefulness and user acceptance, meanwhile perceived usefulness did not effect on user acceptance.

Keyword: Technology Acceptance Model, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Intention to Use Intans

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sistem Informasi Keuangan Daerah	7
2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah	7
2.1.2 Fungsi Utama Sistem Informasi Keuangan Daerah	8
2.1.3 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	8
2.1.4 Ruang Lingkup Aplikasi SIPKD	9
2.1.5 Fungsi dan Output Modul-Modul	10
2.1.6 Hubungan Antar Modul	12

2.1.7	Penyiapan Aplikasi	13
2.1.8	Pengaturan Awal Aplikasi	15
2.2	TRA (<i>Theory of Reasoned Action</i>)	17
2.3	TAM (<i>Technology Acceptance Model</i>)	18
2.3.1	Persepsi Kemudahan Penggunaan	19
2.3.2	Persepsi Kegunaan	20
2.3.3	Penerimaan Pengguna SIPKD	21
2.4	Penelitian Terdahulu	22
2.5	Kerangka Pikir Penelitian	25
2.6	Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Rancangan Penelitian	31
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3	Populasi dan Sampel	31
3.4	Jenis dan Sumber Data	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data	32
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	32
3.7	Instrumen Penelitian	34
3.8	Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Data	40
4.2	Analisis Deskriptif	42
4.3	Analisis Data	43
4.3	Pembahasan	48

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	53
-----	------------------	----

5.2 Saran.....	53
5.3 Keterbatasan dari Penelitian.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Indikator Variabel Laten	35
3.2	Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS	37
4.1	Statistik Deskriptif Sampel	41
4.2	<i>Descriptive Statistics</i>	42
4.3	<i>Cross Loading</i>	45
4.4	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	46
4.5	<i>Composite Reliability</i>	47
4.6	<i>R-Square</i>	47
4.7	Hasil Uji Hipotesis	48
4.8	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Hubungan Antar Modul	13
2.2 Tombol Internet Explorer	14
2.3 Pengisian Alamat/ <i>Address</i>	14
2.4 Modul-Modul Aplikasi SIPKD	15
2.5 Modul <i>Utility</i>	16
2.6 Pengisian <i>Field</i> Pengguna dan Password	16
2.7 <i>Theory of Reasoned Action</i> (TRA)	17
2.8 <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)	19
2.9 Kerangka Penelitian	27
2.10 Model Penelitian	30
4.1 Model Struktural	44
4.2 <i>Output</i> Model Pengukuran	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Teori	58
2. Kuesioner	66
3. SKPD yang menjadi responden	70
4. Hasil Olah Data	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di masa sekarang ini mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Salah satu teknologi yang berkembang dengan pesat adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pemanfaatan dalam kehidupan masyarakat secara luas juga mengalami peningkatan sangat besar. Berbagai kepentingan menjadi dasar pertimbangan, dari mulai hanya sebagai *life style* atau pelengkap sampai dengan menjadi perangkat dan sarana yang menempati posisi vital. Hal ini bukan saja terjadi pada masing-masing individu, tetapi juga terjadi pada berbagai organisasi secara luas. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan organisasi sudah menjadi kebutuhan bagi tiap organisasi untuk mencapai efisien dan efektivitas organisasi, berbagai bentuk aplikasi teknologi informasi yang tersedia dimanfaatkan, antara lain: aplikasi perkantoran (pengolah kata, pengolah data, pengolah grafis), serta fasilitas komunikasi (*e-mail, chatting, teleconference*).

Penerapan sistem informasi di pemerintahan daerah merupakan suatu langkah penting untuk menciptakan *good governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Konsep sistem informasi yang akan diterapkan adalah konsep sistem informasi yang terintegrasi yang akan didukung oleh jaringan komunikasi yang handal. Setiap sistem informasi yang ada diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat dan *stakeholder* pemerintah daerah.

Upaya untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Oleh karena itu, dikeluarkan seperangkat peraturan untuk mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai upaya untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang cepat, akurat dan akuntabel.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang biasa juga disebut Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIPKD juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Departemen Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Sejak tahun 2010, pemerintah kota Parepare telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi ini juga diterapkan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di kota Parepare. Hal ini dilakukan agar memudahkan para staf SKPD yang ditugaskan untuk melakukan penginputan data-data dokumen keuangan, seperti Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tidak perlu lagi repot datang ke Bagian Keuangan Setdako Parepare dan cukup mengakses aplikasi SIPKD di kantor masing-masing.

Penerapan teknologi baru dalam suatu organisasi akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi, terutama pada sumber daya manusia. Faktor pengguna sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru, karena tingkat kesiapan pengguna untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar dalam menentukan pengembangan/penerapan sistem tersebut, (Kustono, 2000). Pentingnya mengetahui penerimaan *user* terhadap penerapan TI, mendorong dilakukannya berbagai penelitian, antara lain: penerimaan teknik audit berbantuan komputer (Tangke, 2004), penerimaan terhadap sistem *core banking* (Sekundera, 2006) dan penerimaan *personal computer* (Kholis, 2002).

Pemakaian *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam penelitian tentang penggunaan teknologi sudah dilakukan oleh beberapa peneliti di negara yang berbeda dan penerapan teknologi yang berbeda pula untuk menguji keakuratan TAM. Beberapa peneliti yang dimaksud di antaranya adalah (1) *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology* (Davis, F.D., 1989), (2) *Modelling the User Acceptance of E-Mail* (Hubona and Jones, 2003), (3) *Internet Banking: An Empirical Study Of Adoption Rates Among Midwest Community Banks* (Husein, 2009), dan (4) *The Applicability of TAM Outside North America: An Empirical Test in The United Kingdom* (Al-Gahtani, 2001). Tujuan utama TAM adalah untuk memberikan penjelasan tentang penerimaan komputer secara umum dan memberikan penjelasan tentang perilaku/sikap pengguna dalam suatu populasi (Davis, 1989). Penerimaan penggunaan sistem teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh perilaku/sikap pengguna karena sistem tersebut dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Keputusan individu atau organisasi untuk menerima suatu sistem teknologi informasi merupakan upaya sadar yang dapat dijelaskan dan dipredikasi oleh niat perilakunya.

Penelitian kali ini akan membahas bagaimana penerimaan pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Parepare mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan menggunakan model TAM (*Technology Acceptance Model*). Atas dasar itu, maka penulis mengambil judul “Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Parepare”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap persepsi kegunaan (*perceived use*)?
2. Apakah persepsi kegunaan (*perceived use*) berpengaruh terhadap penerimaan pengguna (*user acceptance*) aplikasi SIPKD pada pemerintah kota Parepare?
3. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap penerimaan pengguna (*user acceptance*) aplikasi SIPKD pada pemerintah kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap persepsi kegunaan (*perceived use*).
2. Untuk mengetahui persepsi kegunaan (*perceived use*) berpengaruh terhadap penerimaan pengguna (*user acceptance*) aplikasi SIPKD pada pemerintah kota Parepare.

3. Untuk mengetahui persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap penerimaan pengguna (*user acceptance*) aplikasi SIPKD pada pemerintah kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah.

1. Kegunaan teoretis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti karena memberi kesempatan untuk menguji teori sistem informasi keperilakuan yang diperoleh selama dibangku perkuliahan khususnya tentang model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model* (TAM)). Hasil ini diharapkan pula dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah referensi kepustakaan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.
2. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi pemerintah kota Parepare dalam melaksanakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan pelaksanaan penulisan yaitu sebagai berikut. Bab I mengenai pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang teori yang melandasi penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian, serta hipotesis.

Bab III mengenai metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, serta analisis data.

Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

Bab V mengenai penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian, saran, dan keterbatasan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan aplikasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah seperangkat aplikasi komputer yang digunakan untuk membantu proses administrasi data keuangan pemerintah daerah. Menurut undang-undang peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Dengan demikian penyelenggaraan SIKD merupakan bentuk operasional pelaksanaan e-government (*government to government*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan aliran data dan informasi, pemerintah pusat berkepentingan menghimpun data-data keuangan daerah yang

berasal dari informasi keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Setidaknya data tersebut dipergunakan dalam mengalokasikan dana-dana pusat ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal

2.1.2 Fungsi Utama Sistem Informasi Keuangan Daerah

Fungsi utama aplikasi sistem informasi keuangan daerah yaitu sebagai berikut.

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban).
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai salah satu bentuk manifestasi aksi nyata dalam Departemen Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undang dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dibuatlah Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD).

2.1.3 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas diperlukan adanya SIPKD. Sistem tersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya yang luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses,

mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Pengembangan SIPKD untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi. Pentingnya langkah strategis untuk meningkatkan performansi pengelolaan keuangan daerah dan memperbaiki kualitas APBD dengan melaksanakan program yakni dengan merencanakan pengembangan SIPKD.

2.1.4 Ruang Lingkup Aplikasi SIPKD

Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah baik pada tingkat SKPD maupun SKPKD, yang mencakup (a) penyusunan anggaran, (b) pelaksanaan anggaran, (c) penyusunan anggaran perubahan, dan (d) penyusunan pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini terbagi dari 3 modul yaitu sebagai berikut.

- a. 3 (tiga) modul utama, yaitu Modul Anggaran, Modul Kas dan Modul Pembukuan.
- b. 2 (dua) modul penunjang, yaitu Modul *Utility* dan Modul *Data Master*.
- c. 1 (satu) modul tambahan, yaitu Modul Manajemen.

Hubungan aplikasi antar SKPD dan SKPKD dapat dihubungkan secara *on line* maupun *off line* tergantung dari ketersediaan infrastruktur yang ada. Hubungan secara *off line* dalam proses penyusunan anggaran dan perubahan anggaran data antara SKPD dan SKPKD dapat dilakukan melalui penggabungan data untuk kepentingan konsolidasi.

2.1.5 Fungsi dan Output Modul-Modul

1. Modul Utility

Modul Utility merupakan modul penunjang bagi 3 Modul Utama terkait pengoperasian aplikasi secara umum dalam beberapa hal mencakup pengaturan-pengaturan dalam penggunaan aplikasi. Modul *Utility* berfungsi antara lain sebagai berikut.

- a. Konfigurasi nama pemerintah daerah yang menjadi pemilik/pengguna dari aplikasi ini.
- b. Daftar dan hak akses para pengguna/operator yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi.
- c. Proses *Backup* dan *Restore database* aplikasi.

2. Modul Data Master

Selain *Modul Utility*, *Modul Data Master* juga merupakan modul penunjang bagi 3 Modul Utama dalam beberapa hal terkait pengoperasian aplikasi. Modul ini merupakan modul yang mengatur data-data pokok yang menjadi syarat dalam penggunaan aplikasi pada modul-modul berikutnya. Secara rinci fungsi dari modul ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengatur periodisasi anggaran
- b. Mengatur Tahapan anggaran
- c. Mengatur Organisasi, Program dan Kegiatan SKPD
- d. Mengatur Rekening APBD, Neraca dan Rekening koran
- e. Mengatur Daftar Pegawai, Bendahara dan Atasan langsung
- f. Mengatur Penandatanganan Dokumen
- g. Modul ini juga menghasilkan dokumen antara lain.
 1. Daftar Urusan dan Organisasi
 2. Daftar Program dan Kegiatan

3. Daftar Rekening Belanja

3. Modul Anggaran

Modul Anggaran merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membantu proses penyusunan dokumen-dokumen anggaran yang terdiri dari.

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
- b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- c. APBD beserta Lampiran dan Penjabarannya
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- e. Surat Penyediaan Dana (SPD)
- f. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- g. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
- h. APBD-Perubahan beserta Ringkasan dan Penjabarannya.

4. Modul Kas

Modul Kas merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membantu proses penatausahaan pelaksanaan APBD, terkait dengan kontrol atas ketaatan terhadap anggaran yang dilakukan oleh sistem dan penerbitan serta pencatatan dokumen-dokumen sebagai berikut.

- a. Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
- b. Bukti Pengeluaran Kas (BPK)
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Surat Permintaan Membayar (SPM)
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- f. Daftar Penguji (DP)
- g. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- h. Surat Tanda Setoran (STS)
- i. Daftar Penguji (DP)
- j. Buku Kas Umum (BKU)

k. Kartu Kendali Belanja Tak Langsung

l. Kartu Kendali Kegiatan.

5. Modul Pembukuan

Modul Pembukuan merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membantu proses pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah baik di SKPD maupun di SKPKD yang terdiri dari proses-proses yaitu sebagai berikut.

a. Jurnal Penerimaan Kas

b. Jurnal Pengeluaran Kas

c. Jurnal SPJ

d. Jurnal Transfer Kas

e. Jurnal Korolari

f. Jurnal Memorial

g. Buku Besar Pendapatan

h. Buku Besar Belanja

i. Buku Besar Pembiayaan

j. Laporan Realisasi Anggaran (Semesteran dan Tahunan)

k. Neraca

l. Laporan Arus Kas.

6. Modul Manajemen

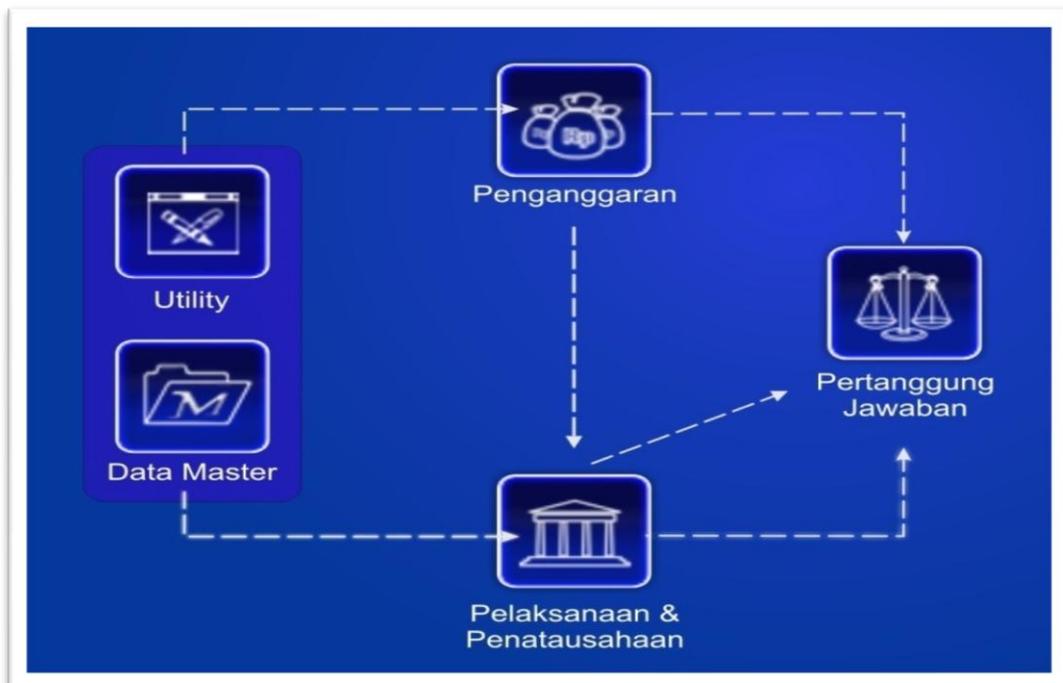
Modul Manajemen merupakan modul pelengkap yang disediakan oleh aplikasi guna membantu para pimpinan dalam mendapatkan informasi/laporan terkini tentang proses pengelolaan keuangan daerah mulai proses anggaran hingga pertanggungjawaban. Modul ini menampilkan seluruh menu laporan yang menjadi output dari modul utama.

2.1.6 Hubungan Antar Modul

Perlu diketahui bahwa keenam modul tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya. Keterkaitan modul-modul tersebut dihubungkan pada beberapa

data yang secara langsung digunakan oleh beberapa modul tertentu di beberapa menunya di samping keterkaitan data antar modul.

Modul Utility dan *Modul Data Master* merupakan modul penunjang, hal ini dikarenakan kedua modul tersebut secara struktur data dan aliran menu menunjang terhadap kebutuhan modul utama atau dengan kata lain akan terjadi permasalahan dalam pengelolaan transaksi apabila data dalam *modul data master* dan *utility* tidak dilakukan terlebih dahulu. Contoh keberadaan *data master* program dan kegiatan dientri pada *modul data master* yang akan digunakan oleh 3 (tiga) modul utama.



Sumber: Departemen Dalam Negeri (2010:7)

Gambar 2.1 Hubungan Antar Modul

2.1.7 Penyiapan Aplikasi

Penyiapan berupa instalasi aplikasi ke dalam perangkat keras dapat dilakukan apabila perangkat keras telah dilengkapi dengan *operating system* dan perangkat lunak penunjang yang disyaratkan dalam menjalankan aplikasi. Perlu

diingat bahwa untuk aplikasi yang berbasis *web process setup* (instalasi dan pengaturan *database*) aplikasi hanya dilakukan pada komputer yang berfungsi sebagai *server*, sedangkan pada komputer *client* cukup menjalankan *Internet Explorer* dengan melakukan pengaturan atas *IP address* server.

- a. Penyiapan Database
- b. Setup Aplikasi
- c. Memulai Aplikasi

Untuk memulai menjalankan aplikasi, klik tombol *internet explorer* yang terdapat dalam *task bar* dan isi *address bar* seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.2 dan 2.3 berikut.



Sumber: Departemen Dalam Negeri (2010:9)

Gambar 2.2 Tombol Internet Explorer



Sumber: Departemen Dalam Negeri (2010:9)

Gambar 2.3 Pengisian Alamat/Address

Setelah pengisian *address bar* di atas, kemudian kita menekan tombol 'enter' pada *keyboard* komputer, maka akan tampil *window* baru berupa 'popup' yang berisi modul-modul yang terdapat dalam aplikasi SIPKD, seperti yang pada gambar berikut ini.



Sumber: Departemen Dalam Negeri (2010:10)

Gambar 2.4 Modul-Modul Aplikasi SIPKD

2.1.8 Pengaturan Awal Aplikasi

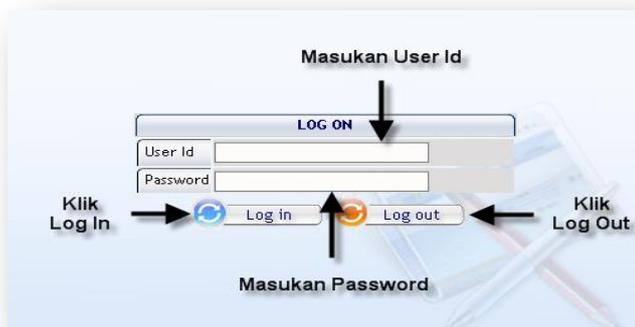
Sebelum menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, terdapat pengaturan awal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tujuan pengaturan-pengaturan ini adalah untuk menjamin jalannya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dihasilkan informasi yang akurat dan handal untuk dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan yang bersifat taktis dan strategis dalam menjalankan pemerintahan daerah. Salah satu contoh dari pengaturan ini adalah dengan menggunakan modul *utility*. Untuk masuk ke dalam modul ini klik modul *utility* seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut.



Sumber: Departemen Dalam Negeri (2010:11)

Gambar 2.5 Modul *Utility*

Setelah tombol tersebut dieksekusi, selanjutnya akan tampil kotak untuk pengisian pengguna dan *password*. Kemudian isi nama pengguna dan *password* yang telah disediakan. Pengisian dilakukan seperti yang terlihat dalam gambar berikut.



Sumber: Departemen Dalam Negeri (2010:11)

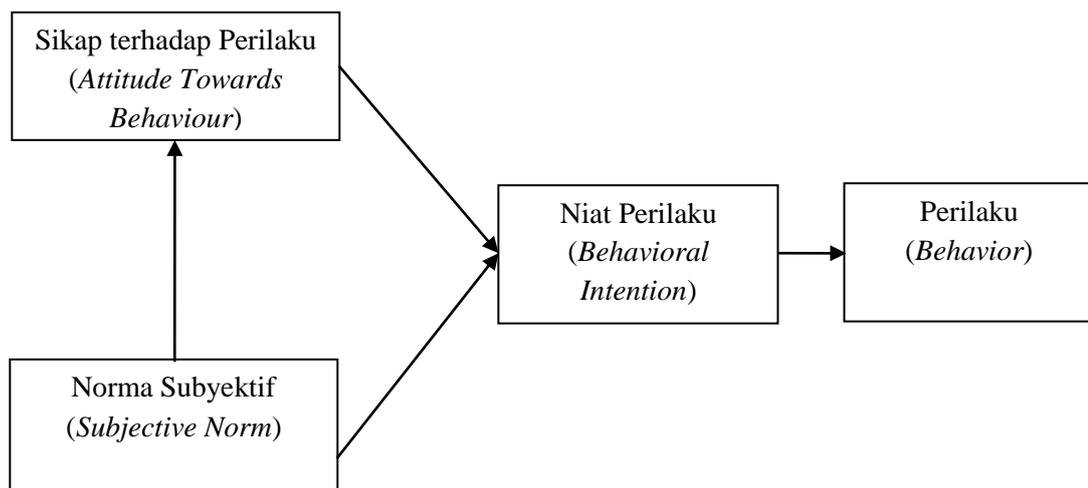
Gambar 2.6 Pengisian *Field* Pengguna dan *Password*

Setelah pengisian pengguna dan *password* selesai dilakukan, selanjutnya klik tombol , untuk masuk kedalam modul. Selanjutnya akan tampil

tampilan *window utility* dengan urutan menu-menunya. Pengaturan-pengaturan ini akan terus dilakukan dengan modul-modul yang lainnya.

2.2 TRA (*Theory of Reasoned Action*)

Teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action* atau disingkat TRA) dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (1980). TRA adalah teori yang menjelaskan bahwa niat dari seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku (Jogiyanto, 2007: 31). Model dari *Theory of Action Reasoned* (TRA) sebagai berikut.



Sumber: Jogiyanto (2007)

Gambar 2.7 *Theory of Reasoned Action* (TRA)

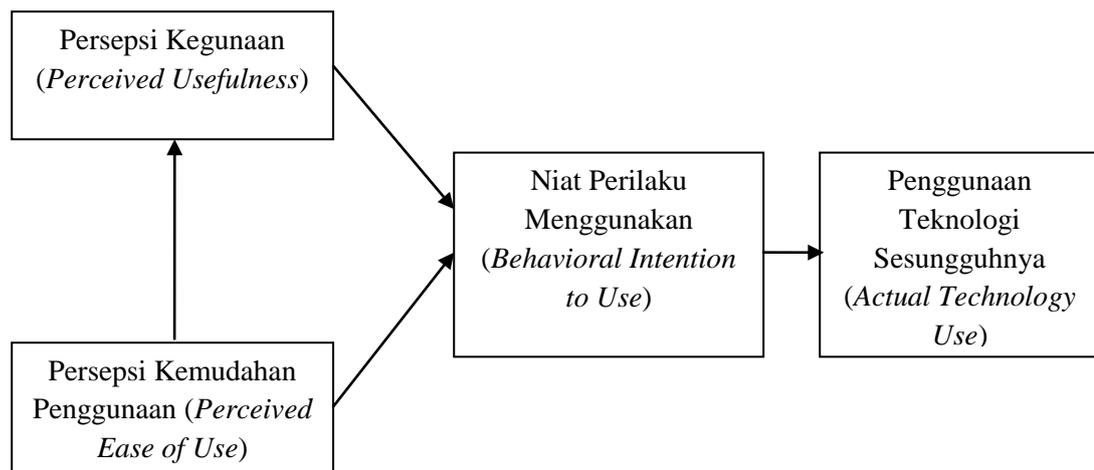
Teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) ini menjelaskan tahapan-tahapan manusia melakukan perilaku. Pada tahap awal, perilaku (*behavior*) diasumsikan ditentukan oleh minat (*intention*). Pada tahap berikutnya niat-niat dapat dijelaskan dalam bentuk sikap-sikap terhadap perilaku (*attitudes toward the behavior*) dan norma-norma subyektif (*subjective norms*). Tahap ketiga mempertimbangkan sikap-sikap (*attitudes*) dan norma-norma subyektif (*subjective norms*) dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan tentang ekspektasi-

ekspektasi normatif dari orang yang direferensi (*referent*) yang relevan. Secara keseluruhan, berarti perilaku seseorang dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kepercayaan-kepercayaannya. Karena kepercayaan-kepercayaan seseorang mewakili informasi yang mereka peroleh tentang dirinya sendiri dan tentang dunia di sekeliling mereka, ini berarti bahwa perilaku terutama ditentukan oleh informasi (Jogiyanto, 2007: 35-36).

2.3 TAM (*Technology Acceptance Model*)

TAM (*Technology Acceptance Model*) pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986, teori ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* atau TRA oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model* atau TAM) merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Tujuan utama TAM seperti yang dinyatakan oleh Davis adalah untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan teknologi informasi dengan jangkauan luas dari teknologi informasi dan populasi dari pengguna.

TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA. Dua konstruk utama ini adalah kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*). TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk tersebut (Jogiyanto, 2007: 111). Model dasar TAM seperti yang dikembangkan Davis *et al.* (1989) digambarkan pada gambar 2.8 berikut ini.



Sumber: Davis *et al.* (1989)

Gambar 2.8 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Dalam penelitian ini, konstruk yang diteliti dibatasi hanya pada 3 konstruk utama, yaitu Persepsi Pengguna terhadap Kemudahan dalam menggunakan SIPKD (*Perceived Ease Of Use*), Persepsi Pengguna terhadap Kegunaan SIPKD (*Perceived Usefulness*), dan Penerimaan Pengguna terhadap SIPKD (*Acceptance of SIPKD*). Variabel *behavioral intention to use* dan *actual technology use* digantikan oleh variabel *IT acceptance* karena pada dasarnya variabel *behavioral intention to use* dan *actual technology use* adalah indikator untuk mengukur *IT acceptance* (Al-Gahtani dalam Tangke, 2005). Untuk lebih jelasnya, model yang dipakai dalam penelitian ini ada pada Gambar 2.10.

2.3.1 Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*)

Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*) dapat didefinisikan sebagai tingkatan di mana *user* percaya bahwa teknologi/sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah. Menurut Jogiyanto (2007:115), *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Berdasarkan definisinya, diketahui

bahwa *perceived ease of use* ini juga merupakan suatu kepercayaan (*belief*) tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya.

Persepsi kemudahan penggunaan dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama berfokus pada teknologi itu sendiri misalnya pengalaman pengguna terhadap penggunaan teknologi yang sejenis. Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi yang baik adalah reputasi yang didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan pengguna akan kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme *support* yang handal. Mekanisme *support* yang terpercaya akan membuat pengguna merasa yakin bahwa terdapat mekanisme *support* yang handal jika kesulitan menggunakan teknologi maka mendorong persepsi pengguna kearah positif.

2.3.2 Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) didefinisikan sebagai tingkatan di mana *user* percaya bahwa dengan menggunakan teknologi/sistem akan meningkatkan performa mereka dalam bekerja. Persepsi kegunaan yang dimaksud disini adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi yang digunakan.

Menurut Jogiyanto (2007: 114), *perceived usefulness* didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Berdasarkan definisi, diketahui bahwa *perceived usefulness* merupakan suatu kepercayaan (*belief*) tentang proses

pengambilan keputusan. Dengan demikian jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya.

2.3.3 Penerimaan Pengguna SIPKD (*Acceptance of SIPKD*)

Iqbaria (1994), Nelson (1996), Luthans (1995) dalam jurnal Purwatiningsih dan Eniyati (2011) menyatakan bahwa secara individu maupun kolektif penerimaan penggunaan dapat dijelaskan dari variasi penggunaan suatu sistem karena diyakini penggunaan suatu sistem yang berbasis teknologi informasi dapat mengembangkan kinerja individu atau kinerja organisasi. Jika informasi yang dihasilkan dari teknologi informasi yang digunakan semakin akurat, tepat waktu, dan memiliki reliabilitas yang baik, akan semakin meningkatkan kepercayaan pemakai sistem teknologi informasi.

Para peneliti menemukan beberapa indikator untuk menjelaskan penerimaan teknologi informasi (*Information Technology Acceptance*). Dua indikator yang paling dapat diterima adalah kepuasan pengguna (*user satisfaction*) dan kegunaan sistem (*system usage*). Berdasarkan penelitian oleh Davis, *et al.* (1989); Iqbaria, *et al.* (1997) dan Tangke (2004) menyatakan bahwa *system usage* merupakan indikator utama dalam penerimaan teknologi. Penelitian ini menyesuaikan konstruk penerimaan teknologi informasi (*information technology acceptance*) dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) menjadi penerimaan pengguna terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Peningkatan kepercayaan pemakai sistem informasi diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Davis (1989), Adams *et al.* (1992), Szajna (1996), dan Iqbaria *et al.* (1997) menjadikan

penggunaan sistem dan frekuensi penggunaan komputer sebagai indikator utama penerimaan penggunaan teknologi informasi. Frekuensi penggunaan sistem yang berkesinambungan dapat meningkatkan kinerja sehingga mengindikasikan adanya penerimaan teknologi informasi tersebut.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian empiris yang menguraikan hubungan antar variabel penelitian berdasarkan pendapat dan hasil penelitian sebelumnya.

1. Davis *et al* (1989) dengan judulnya "*User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Model*", menunjukkan hasil yaitu *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* berpengaruh pada niat seseorang, tetapi *perceived usefulness* memiliki tingkat signifikansi yang lebih kuat. Sikap memediasi *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* secara terpisah dan norma subyektif tidak memiliki pengaruh pada minat.
2. Tangke (2005), melakukan penelitian mengenai penerimaan penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan menggunakan model TAM pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pengguna tentang kegunaan TABK dengan koefisien sebesar 0,66 dan tingkat signifikansi 5,33. Persepsi kegunaan TABK tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap pengguna tentang penggunaan TABK. Persepsi kemudahan penggunaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap penggunaan TABK dengan koefisien sebesar 0,66 dan tingkat signifikansi 5,65. Sikap penggunaan TABK tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pengguna TABK dan persepsi kegunaan TABK terbukti memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap penerimaan

pengguna akan TABK dengan koefisien sebesar 0,3 dan tingkat signifikansi 1,97.

3. Purwatingtyas dan Eniyati (2011), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model TAM yang diuraikan dalam penelitian ini memberikan gambaran pada aspek manfaat dirasakan dan mudah penggunaan TI. TI dapat diterima jika memiliki karakteristik sesuai dengan apa yang diinginkannya. Secara teoritis, pengadopsian teori-teori keprilakuan dalam studi-studi TI memberikan akselerasi kajian di bidang TI sehingga inovasi pengembangan TI dan sistim informasi mengarah pada kebutuhan pengguna (*user*) dengan kemudahan penggunaannya. Implikasi ini didasari pada argumentasi bahwa interaksi antara ketiga unsur dalam pengembangan TI tidak dapat dihindari, yaitu interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna, artinya aspek prilaku itu memang penting untuk diperhatikan. Hasil yang diperoleh kemudahan penggunaan berpengaruh pada manfaat yang dirasakan, sebaliknya kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan tidak berpengaruh pada penerimaan TI.
4. Rahadi (2007), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model TAM memberikan gambaran pada aspek manfaat yang dirasakan dan mudah dalam penggunaan TI. TI dapat diterima jika memiliki karakteristik sesuai dengan apa yang diinginkannya. Secara teoritis, pengadopsian teori-teori keprilakuan dalam studi-studi TI memberikan akselerasi kajian di bidang TI sehingga inovasi-inovasi pengembangan TI dan sistem informasi mengarah pada kebutuhan pengguna (*user*) dengan kemudahan penggunaannya. Dengan demikian secara teoretis dapat diuraikan bahwa implikasi penerapan TI adalah pada aspek keprilakuan yang berkaitan dengan pengembangan TI. Implikasi ini didasari pada argumentasi bahwa interaksi antara ketiga unsur dalam pengembangan TI tidak dapat dihindari, yaitu interaksi antara

perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna, artinya aspek perilaku itu memang penting untuk diperhatikan. Hasil yang diperoleh kemudahan penggunaan berpengaruh pada manfaat yang dirasakan, sebaliknya kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan tidak berpengaruh pada penerimaan TI.

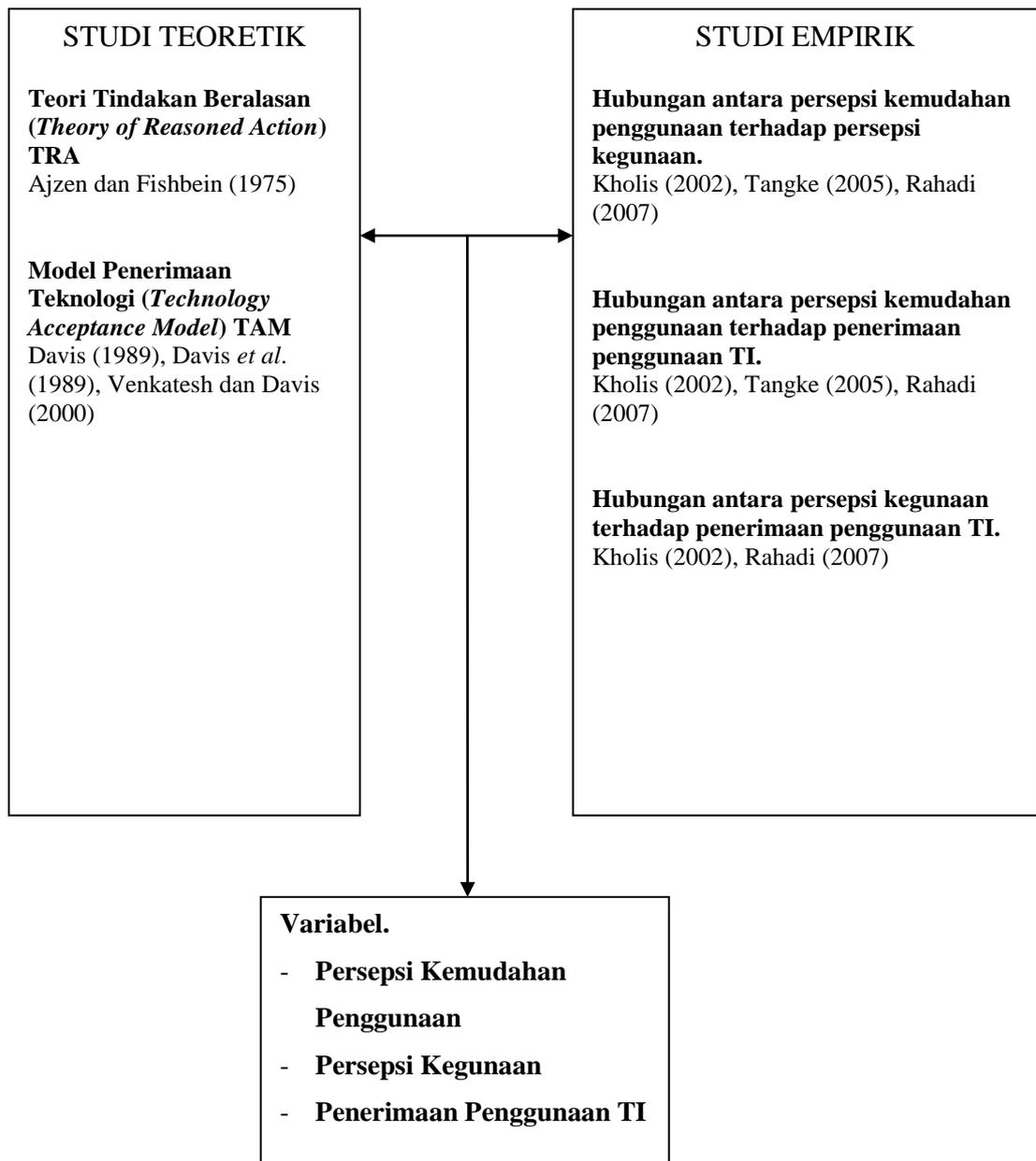
5. Sekundera (2006), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dengan menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM) yaitu sebuah model penerimaan teknologi informasi yang terdiri dari variabel Kemudahan dan Kemudahan Penggunaan terbukti dapat mempengaruhi dengan mudah diterimanya sistem *core banking* oleh karyawan di Bank ABC. Begitu juga analisis dengan menggunakan model *End User Computing Satisfaction* (EUCS) dapat disimpulkan bahwa variabel Akurasi, Kemudahan, dan Ketepatan Waktu dapat mempengaruhi karyawan di Bank ABC dalam penerimaan sistem *core banking*. Namun variabel Isi dan Bentuk tidak mempengaruhi penerimaan sistem *core banking* di Bank ABC. Kesimpulannya adalah secara empiris terbukti model TAM dan EUCS adalah salah satu model prediksi yang valid dimana seluruh variabel kecuali Isi (*content*) dan Bentuk (*format*) mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan sistem *core banking* di Bank ABC.
6. Wijaya (2005), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa TAM merupakan metode pendekatan untuk mengukur penerimaan pengguna terhadap teknologi, penerimaan pengguna terhadap teknologi mempengaruhi keberhasilan adopsi teknologi ke dalam organisasi, penerimaan pengguna terhadap teknologi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan teknologi, dan TAM dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan upaya upaya yang diperlukan untuk mendorong kemauan menggunakan teknologi.

7. Wibowo (2010), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh antara persepsi tentang kemudahan penggunaan web (PEOU) dengan sikap penggunaan (ATU). Berdasarkan pertanyaan kuesioner dan hasil pengolahan datanya dapat diketahui bahwa pemasangan software *antivirus* lebih mencerminkan rasa penolakan terhadap pengaruh negatif yang bisa muncul dari penggunaan web, sementara pemasangan *software* pengatur *download* mencerminkan rasa menerima atas informasi yang disajikan oleh web.
8. Kholis (2002), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan penggunaan PC (*Personal Computer*), variabel persepsi kemudahan penggunaan secara positif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan penggunaan PC, dan secara simultan kedua variabel tersebut secara positif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan penggunaan PC, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat mempengaruhi dengan mudah diterimanya *Personal Computer* (PC).

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang menggambarkan antar variabel yang diuji. Kerangka proses berpikir studi ini didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi dan tunjauan pustaka. Kerangka proses berpikir merupakan bagan komprehensif yang menunjukkan gambaran mengenai penyusunan skripsi berdasarkan pemaparan studi teoritik dan studi empirik. Studi teoritik dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diajukan dalam studi ini, yaitu teori TAM (*Technology Acceptance model*). Ketika melakukan studi teoritik terjadi proses

berpikir deduktif, yaitu proses berpikir dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Studi empirik dilakukan dengan cara mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam studi ini. Berdasarkan studi teoritik dan studi empirik ditemukan variabel-variabel penelitian tersebut ditentukan sehingga menghasilkan hipotesis, yaitu hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan penerimaan pengguna. Dengan demikian, hipotesis merupakan hasil interaksi dari studi teoritik dan studi empirik. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang harus diuji kebenarannya dengan menggunakan alat bantu uji statistik. Pengujian secara statistik ini akan memberikan informasi tentang pembuktian apakah hipotesis tersebut mendukung atau tidak mendukung studi teoritik dan studi empirik yang digunakan untuk menghasilkan hipotesis dalam skripsi ini. Hasil uji hipotesis secara statistik akan diinterpretasikan dalam pembahasan yang akan menghasilkan kesimpulan skripsi ini. Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.9 Kerangka Penelitian

2.6 Hipotesis

2.6.1 Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Persepsi Kegunaan

Davis *et al.* (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan persepsian sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Meskipun usaha menurut setiap orang berbeda-beda tetapi pada umumnya untuk menghindari penolakan dari

pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, maka sistem harus mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan. Kemudahan penggunaan persepsian merupakan salah satu konstruk dalam TAM yang telah diuji dalam penelitian Davis *et al.* (1989). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor ini terbukti dapat menjelaskan alasan seseorang dalam menggunakan sistem informasi dan menjelaskan bahwa sistem baru yang sedang dikembangkan diterima oleh pengguna.

Penelitian Iqbaria *et al* (1995) menghasilkan bahwa dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) memperlihatkan adanya pengaruh dari *perceived ease of use* terhadap *perceived usefulness*. Davis (1989) dan Adam *et al* (1992) mendefinisikan kemanfaatan (*usefulness*) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subyek tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Jadi kemanfaatan penggunaan TI dapat diketahui dari kepercayaan pengguna TI dalam memutuskan penerimaan TI, dengan satu kepercayaan bahwa penggunaan TI tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya. Komputer dirasa sangat membantu dalam melakukan pekerjaan dan mempertinggi prestasi kerja yang akan dicapainya, atau dengan kata lain orang tersebut mempercayai penggunaan TI telah memberikan manfaat terhadap pekerjaan dan pencapaian prestasi kerjanya. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H₁ : Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan

2.6.2 Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Penerimaan Pengguna Teknologi Informasi

Iqbaria (1994), Nelson (1996), Luthans (1995) dalam penelitian Purwatiningsih dan Eniyati (2011) menyebutkan bahwa secara individu maupun kolektif penerimaan pengguna dapat dijelaskan dari variasi penggunaan suatu sistem, karena diyakini penggunaan suatu sistem yang berbasis TI dapat mengembangkan kinerja atau kinerja organisasi. Beberapa penelitian lain telah mengidentifikasi indikator penerimaan TI, dimana secara umum diketahui bahwa penerimaan TI dilihat dari penggunaan sistem dan frekuensi penggunaan komputer. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H₂ : Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap penerimaan pengguna teknologi informasi.

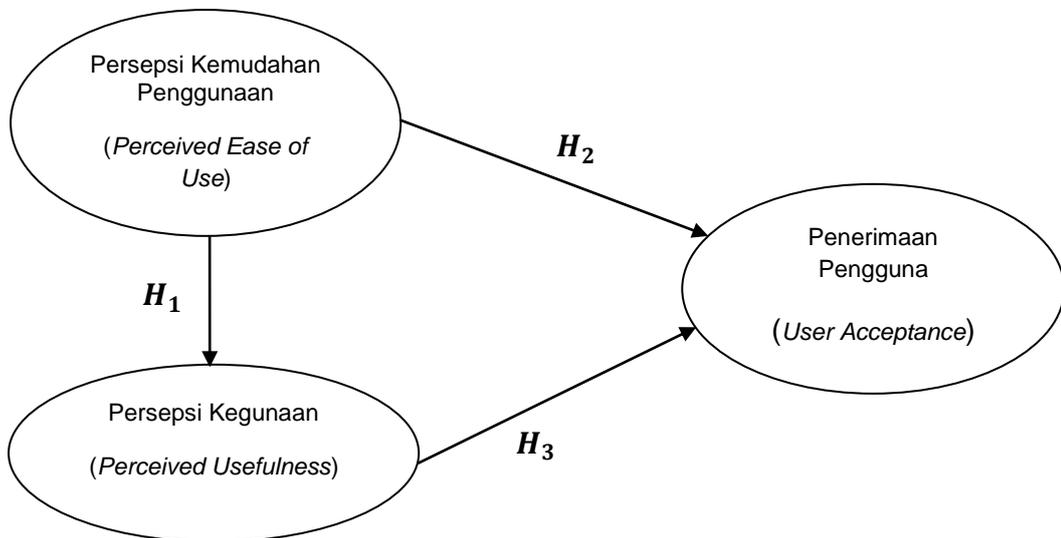
2.6.3 Persepsi Kegunaan terhadap Penerimaan Pengguna Teknologi Informasi

Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu akan menaikkan kinerjanya (Davis, 1989). Individu yang mempersepsikan suatu tindakan berperan dalam mencapai hasil bermanfaat, dia akan lebih bersedia menerima teknologi baru, dalam hal ini sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Davis (1989) menemukan bahwa persepsi kegunaan lebih kuat dan konsisten berhubungan dengan penggunaan sistem dibandingkan dengan variabel lainnya di literatur-literatur sistem informasi, misalnya persepsi kemudahan penggunaan. Manfaat yang diperoleh sebagai kompensasi penerimaan sistem baru lebih bisa diterima meskipun ada kesulitan pada permulaan adopsi sistem. Terdapat pengaruh persepsi kegunaan terhadap sikap

dan perilaku penggunaan aktual, namun sikap ditemukan tidak mengintervensi penggunaan aktual.

Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. Dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari komputer. Perbandingan kemudahan tersebut memberikan indikasi bahwa orang yang menggunakan TI bekerja lebih mudah dibandingkan dengan orang yang bekerja tanpa menggunakan TI (secara manual). Pengguna TI mempercayai bahwa TI yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahan penggunaan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H₃ : Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penerimaan pengguna teknologi informasi



Sumber: Davis *et al.* (1989)

Gambar 2.10 Model Penelitian